

## Daftar Pustaka

Aminuddin Iimar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet.1, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.

Aries Djaenuri & Enceng, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentian Menurut sistem Pemerintahan Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Djkosutono, *Hukum Pidana*, Dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditia, 1997.

Philipus M. Hadjon, Bagird Manan, *Pengantar Hukum Administarsi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, Bandung: Refika Aditama 2018.

Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Schmid, J.J. Von, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*, Jakarta :Pembangunan & Erlanga, 1979.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlanga, 1980.

Dewi Tri Wahyuni Fuqoha, *Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, 2018.

Isnawati, *Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Di Indonesia Saat Ini*, Jurnal Hukum Responsif.

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal. Ilmu Hukum Legal Opinion Ed,2, Volume 1, Tahun 2013.

Dewi Sendhikasari D., *Wacana Pejabat Gubernur Dari Polri*, Jurnal Info Singkat Vol.10.

Shidarta, *Asas Legalitas*, Binus University Faculty Of Humanities, 2016.

Hanifa Safira br Sinaga, Asas Legalitas Dalam Hukum Administarsi Negara, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Bivitri Susanti, Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Jentera Vol.1, 2017.

Rahyunir Rauf, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah, Jurnal Kajian Pemerintah, Vol.IV No1, 2018.

Muhammad Rizky Pranata, "Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah", Jurnal ICA of Law, Vol.1, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang No 23 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

## **Lain-lain**

<https://id.m.wikipedia.com>, di akses pada tanggal 8 Januari 2022.

<http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jendral-polisi-jadi-plt-gubernur>, di akses pada 29 Maret 2022.

<http://business-law.binus.ac.id/2017/02/22/sekilas-perihal-hak-angket-dpr/>  
di akses pada 22 juni 2020